

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL

Syarif Hidayat (1), Adji Suradji Muhammad (2)

^{1,2}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
masyarif.official@gmail.com, adji.suradji@apmd.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan indikator keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul, Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul terbagi dalam tiga aspek strategis: program pengurangan beban, program pemberdayaan masyarakat, dan program sistem informasi/big data. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui sistem informasi seperti SIDAMESRA, SIDAKIS, dan SEMAKIN yang membantu dalam memberikan keakuratan data. Indikator keluaran kebijakan digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk cakupan, bias, akses, dan keselarasan program dengan kebutuhan. Indikator cakupan menunjukkan belum adanya sistem informasi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk mengetahui apakah mereka penerima bantuan atau bukan. Bias terjadi ketika bantuan tidak tepat sasaran, seringkali karena keleluasaan birokrasi. Terkait akses, website Dinas Sosial Kabupaten Bantul menyediakan formulir pengaduan dan call center online, namun belum ada nomor WhatsApp yang bisa diakses masyarakat. Terkait kesesuaian program dengan kebutuhan, penerima bantuan sudah merasakan manfaat dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, namun perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Kemiskinan; Kebijakan; Sistem Informasi

***Abstract:** This research aims to analyze the strategies and success indicators of poverty alleviation policies in Bantul Regency, Indonesia. Employing a qualitative descriptive method, data was collected through document analysis, observation, and in-depth interviews. The results of this research show that the poverty alleviation policy in Bantul Regency is divided into three strategic aspects: burden reduction programs, community empowerment programs, and information system/big data programs. The Bantul Regency Government has provided several facilities to support poverty alleviation programs through information systems such as SIDAMESRA, SIDAKIS, and SEMAKIN, which assist in providing data accuracy. The policy output indicators are used to assess the success of policy implementation, including coverage, bias, access, and program alignment with needs. The coverage indicator found that there is no information system accommodating the community's need to know whether they are aid recipients or not. Bias occurs when aid is not properly targeted, often due to discretion at the street-level bureaucracy. Regarding access, the Bantul Regency Social Service website offers an online complaint form and call center, but there is no accessible WhatsApp number for the public. Concerning program alignment with needs, aid recipients have felt the benefits and alignment of the program with community needs, but oversight in implementation is necessary.*

Keywords: Poverty; Policy; Information System.

Article History :

Received; Revised; Accepted 11 Juli 2024

PENDAHULUAN

Tingkat kemiskinan yang rendah menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan salah satu hambatan utama dalam mencapai pembangunan yang optimal. Kemajuan dan kemunduran pembangunan kerap diukur berdasarkan perubahan tingkat kemiskinan. Kemiskinan dapat diidentifikasi melalui berbagai indikator, seperti pengangguran, keterbelakangan, dan resesi. Dalam konteks ini, tingkat kemiskinan juga memiliki hubungan erat dengan daya tampung dan jumlah penduduk di suatu wilayah. Kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu mencapai tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dalam standar hidup tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai "kondisi miskin akibat kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan" (Umar et al., 2023).

Para analis umumnya menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok untuk menentukan jumlah penduduk miskin. Seseorang dikategorikan miskin jika asupan kalori hariannya kurang dari 2.100 kilokalori per kapita untuk kebutuhan pokok makanan, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok non makanan (Rindiani & Hartatik, 2020). Kabupaten Bantul, salah satu wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 17 kapanewon, yaitu Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Imogiri, Jetis, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan, dan Sedayu. Ironisnya, Bantul konsisten menduduki peringkat teratas dengan jumlah penduduk miskin di DIY secara data agregat. Data pada tabel berikut ini menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2021, dengan 146.980 jiwa terjerumus ke jurang kemiskinan akibat hantaman pandemi Covid-19. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2023, angka kemiskinan di Bantul masih terbilang tinggi dengan 128.510 jiwa, melampaui kabupaten lain. Mirisnya, 2,5% dari jumlah tersebut tergolong miskin ekstrim.

Tabel 1. Data Kemiskinan Kabupaten Bantul

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	74,62	78,06	81,14	73,21	70,74
Bantul	131,15	138,66	146,98	130,13	128,51
Gunung Kidul	123,08	127,61	135,33	122,82	122,24
Sleman	90,17	99,78	108,93	98,92	97,50
Kota Yogyakarta	29,45	31,62	34,07	29,68	29,48
D.I.Yogyakarta	448,47	475,72	506,45	454,76	448,47
Nasional	25 144,70	26 424,02	27 542,77	26 161,16	25 898,55

Sumber : Booklet Kemiskinan Kabupaten Bantul, BPS 2023

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, seperti yang ditunjukkan data BPS, mendesak perlunya kebijakan tepat untuk mengatasinya. Soetomo (2015:326) menegaskan, kunci mengatasi kemiskinan terletak pada pemahaman menyeluruh tentang latar belakang dan penyebabnya. Bila akar permasalahannya terletak pada individu, solusinya berfokus pada pengembangan diri dan pemberdayaan individu dalam masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, diukur melalui pengeluaran. Penduduk miskin dikategorikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data utama yang digunakan berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. Hingga saat ini, masalah kemiskinan masih menjadi salah satu masalah mendasar yang menjadi perhatian pemerintah di setiap daerah. Aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah 15/2010 dan Instruksi Presiden 4/2022 menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di wilayahnya masing-masing. TKPK ini beranggotakan perwakilan dari berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan kelompok kepentingan lainnya. Pembentukan TKPK bertujuan untuk memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di daerah dilakukan secara bersama-sama, terencana, sistematis, dan terkoordinasi dengan baik demi kepentingan masyarakat (Permendagri 53/2020).

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul selalu menjadi prioritas pembangunan dari waktu ke waktu, mengingat jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan dan cenderung fluktuatif dalam satu dekade terakhir. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan juga berpedoman pada RJPD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana serta didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemiskinan masih menjadi momok yang dihadapi banyak daerah, termasuk Kabupaten Bantul. Kunci dalam strategi penanggulangannya adalah data yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang andal

dapat membantu pembuat kebijakan memahami pola dan penyebab kemiskinan, sehingga mereka dapat menarik perhatian pada kondisi kehidupan masyarakat miskin, mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, membandingkan tingkat kemiskinan di berbagai waktu dan wilayah, serta menyusun program tepat sasaran untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jerat kemiskinan.

Di Kabupaten Bantul, penanggulangan kemiskinan selalu menjadi prioritas pembangunan. Mengingat jumlah penduduk miskin yang cukup besar dan fluktuatif dalam satu dekade terakhir, upaya ini didasarkan pada RJPD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Bantul difokuskan pada mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal, menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko bencana, dan memperkuat nilai keimanan dan ketaqwaan.

Dalam upaya memerangi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bantul mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul, contohnya adalah program jaminan kesehatan. Upaya penanggulangan kemiskinan melalui program jaminan sosial ini merupakan program negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Fahreza et al., 2019). Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyusun berbagai macam program serta kegiatan untuk mengintervensi kemiskinan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Bantul dalam sebuah wawancara yang menyampaikan bahwa total anggaran untuk mengatasi kemiskinan tahun 2023 ada sekitar 104 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut telah disusun sebanyak 25 program pengentasan kemiskinan yang dibagi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi, diantaranya program padat karya infrastruktur, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pelayanan kesehatan gratis, pemberian makanan bergizi sehari dua kali atau boga sehat, serta pelatihan kewirausahaan bagi warga miskin. (<https://jogjapolitan.harianjogja.com>, diakses 03 Januari 2024)

Berikut beberapa program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul:

1. Program padat karya infrastruktur bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin dan meningkatkan infrastruktur di desa-desa.
2. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni untuk mendapatkan rumah yang lebih layak.
3. Pelayanan kesehatan gratis bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang gratis bagi masyarakat miskin.
4. Pemberian makanan bergizi boga sehat bertujuan untuk memberikan makanan bergizi bagi masyarakat miskin, khususnya lanjut usia terlantar dan difabel.
5. Pelatihan kewirausahaan bagi warga miskin bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat miskin dalam berwirausaha.

Selain program-program di atas, Pemerintah Kabupaten Bantul juga melakukan berbagai upaya lain untuk mengentaskan kemiskinan, seperti:

1. Memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dan dunia usaha.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan.
3. Melakukan evaluasi program pengentasan kemiskinan secara berkala.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan tersebut, diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul dapat terus menurun.

Sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul, maka diterbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Kebijakan ini menjadi landasan bagi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai mandat yang tercantum dalam Perda tersebut. Berdasarkan regulasi tersebut, setiap daerah sudah pasti memiliki program atau strategi khusus untuk penanggulangan kemiskinan, salah satunya membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2012. Pembentukan TKPK diharapkan mampu menganalisis kondisi kemiskinan di daerah dan menetapkan prioritas penanggulangannya. Tim ini juga bertugas mengkoordinasikan dan memantau program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.

Kemiskinan di Kabupaten Bantul masih menjadi persoalan yang kompleks dan membutuhkan solusi tepat. Soren C. Winter dalam (Fidarina & Megawati Suci Si.M., 2022) menekankan pentingnya keberhasilan implementasi kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi, sebagai cerminan hubungan antara proses politik dan pemerintahan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh desain kebijakan dan faktor sosial ekonomi di mana kebijakan tersebut dibuat.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan oleh pemerintah belum berhasil secara efektif mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap indikator keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul, agar program tersebut dapat lebih sesuai dengan permasalahan kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Selain itu, program penanggulangan kemiskinan cenderung mengadopsi program dari pemerintah pusat sehingga kurang ada inovasi dan menyebabkan kebijakan tersebut tidak tepat sasaran terhadap permasalahan yang ada. Pemikiran inilah yang

mendorong peneliti untuk mengidentifikasi kebijakan kemiskinan di Kabupaten Bantul dan mengkaji lebih lanjut implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Faktanya, berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah belum menunjukkan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai indikator keberhasilan implementasi kebijakan di Kabupaten Bantul. Analisis ini bertujuan untuk memastikan program tersebut sesuai dengan permasalahan kemiskinan di daerah. Selain itu, kecenderungan program penanggulangan kemiskinan untuk mengadopsi program pusat tanpa inovasi dikhawatirkan menyebabkan disparitas dengan permasalahan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyelami kompleksitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam dan holistik atas berbagai isu dan pertanyaan terkait kebijakan tersebut. Pengambilan data pada penelitian ini meliputi kajian dokumen yakni mendalami dokumen kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul, observasi yaitu mengamati langsung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di lapangan, serta wawancara mendalam yakni menggali informasi dan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan, seperti Bupati Bantul, Bappeda Bantul, Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Ketua TKPK Bantul, dan penerima manfaat program. Untuk memastikan validitas data, triangulasi sumber digunakan. Data yang diperoleh dianalisis dengan teliti untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat analisis implementasi kebijakan. Berdasarkan (Poister, 2003), indikator keberhasilan kebijakan yang ditelaah meliputi:

1. Cakupan, seberapa luas jangkauan program penanggulangan kemiskinan.
2. Bias, apakah program tersebut memiliki kecenderungan untuk menguntungkan kelompok tertentu.
3. Akses, seberapa mudahkah masyarakat miskin mengakses informasi program tersebut.
4. Kesesuaian program dengan kebutuhan, apakah program tersebut sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat miskin.

Analisis terhadap indikator keberhasilan kebijakan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bantul

Meskipun Kabupaten Bantul memiliki sumber daya dan potensi yang melimpah, namun masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Data agregat BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul masih memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di wilayah tersebut. Namun, terdapat tren positif dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, dari 14,04% pada tahun 2021 menjadi 11,96% di tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bantul merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017. Kebijakan ini menjadi dasar bagi berbagai program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul dapat dilakukan melalui program-program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui setidaknya tiga strategi yaitu Program Pengurangan Beban, Program Pemberdayaan Masyarakat, dan pengelolaan sistem informasi.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul berfokus pada pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan taraf hidup masyarakat miskin. Upaya pemberdayaan tersebut meliputi:

- (1) Peningkatan kemampuan dan pendapatan:
 - a. Meningkatkan keterampilan manajemen bagi masyarakat miskin.
 - b. Membuka peluang dan memberikan keberpihakan kepada masyarakat miskin.
 - c. Mempermudah akses terhadap pembiayaan usaha ekonomi skala mikro.
- (2) Penurunan beban pengeluaran:
 - a. Menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan yang kondusif.
 - b. Mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan tingkat produktivitas masyarakat miskin.

- (3) Pengelolaan sistem informasi
Membangun sistem informasi berbasis data base sebagai upaya penanggulangan kemiskinan meliputi Sistem Data Menuju Sejahtera (SIDAMESRA), SIDAKIS (Sistem Informasi Data Kartu Indonesia Sehat), dan SEMAKIN (Sistem Monitoring Penganggulangan Kemiskinan).
Dengan strategi ini, diharapkan masyarakat miskin di Kabupaten Bantul menjadi lebih produktif, mandiri, dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

2. Indikator Keberhasilan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Untuk menilai keberhasilan implementasi, penting untuk secara simultan mengamati hasil kebijakan yang dicapai dan dampaknya. Oleh karena itu, kinerja implementasi kebijakan kemiskinan di Kabupaten Bantul mencakup penilaian terhadap indikator-indikator keluaran kebijakan.

(1) Indikator Cakupan

Efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul diukur berdasarkan cakupan program yang menjangkau kelompok sasaran.

Berdasarkan analisis literatur dan wawancara, program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul terbagi menjadi tiga strategi utama:

- a. Pengurangan Beban : Membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
- b. Pemberdayaan Masyarakat : Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat miskin melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan.
- c. Peningkatan Pendapatan : Menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.

Strategi penanggulangan kemiskinan ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul, dengan Bappeda sebagai koordinator.

Kerjasama antar OPD, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Tujuan utama program-program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi semua penduduk Kabupaten Bantul.

(2) Indikator Bias

Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2022, dengan fokus pada penyaluran bantuan kepada penerima yang tepat sasaran. Upaya ini didukung oleh beberapa fasilitas, seperti SIDAKIS yang membantu masyarakat mendapatkan akses ke jaminan kesehatan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam sistem informasi dan pengawasan program, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk memastikan ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Salah satu kendala utama dalam program ini adalah adanya bias implementasi di tingkat bawah, di mana pejabat berwenang terkadang menggunakan diskresi mendistribusikan bantuan. Hal ini dapat menyebabkan nepotisme dan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan koordinasi yang solid antara pelaksana lapangan dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang komprehensif oleh pemerintah dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan didistribusikan secara tepat sasaran. Dengan melakukan perbaikan ini, diharapkan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuannya untuk memberdayakan masyarakat.

(3) Indikator Akses

Aksesibilitas program dan layanan menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan. Aksesibilitas ini meliputi:

- a. Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan.
- b. Kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan keluhan.
- c. Kesetaraan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, tanpa diskriminasi.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyediakan beberapa saluran akses bagi masyarakat, seperti:

- a. Call center.
- b. Formulir aduan online di website.
- c. Layanan informasi dan pengaduan di kantor Dinas Sosial.

Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam sistem aksesibilitas, yaitu: belum tersedia layanan aduan melalui nomor WhatsApp dan formulir aduan online yang kurang user-friendly. Dengan melakukan perbaikan ini, diharapkan aksesibilitas program dan layanan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi, layanan, dan menyampaikan pengaduan.

(4) Indikator Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi apakah hasil dari kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul sudah memenuhi kebutuhan kelompok sarannya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Penilaian ini berfokus pada persepsi kelompok penerima bantuan untuk menentukan sejauh mana bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan mereka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Dalam penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dengan penerima bantuan penanggulangan kemiskinan, seperti bantuan boga sehat, Jamkesda, dan RTLH, masyarakat merasa terbantu oleh bantuan tersebut. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul tidak hanya berupa bantuan langsung tetapi juga mencakup bantuan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemandirian masyarakat.

Masalah sosial, khususnya kemiskinan, harus diatasi dengan memperbaiki kondisi yang tidak diinginkan atau kejadian yang merusak tatanan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan berarti menyediakan layanan sosial yang diperlukan untuk mengatasi atau mencegah masalah, serta mengembangkan kondisi menuju perbaikan. Dalam penanggulangan kemiskinan, model konvensional, residual, dan karitatif perlu dimodifikasi dengan menekankan pada pemberdayaan kelompok sangat miskin sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Program penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada pemberian bantuan seringkali gagal mengatasi akar masalah ketidakberdayaan dan malah memperkuat ketergantungan. Bantuan finansial yang diberikan sering memperkuat sikap mental penerima bantuan daripada menginspirasi mereka untuk berperan aktif dalam meningkatkan kondisi mereka. Program pemberdayaan seringkali menghadapi masalah keberlanjutan karena mobilisasi atau partisipasi masyarakat yang hanya bersifat formalitas. Masyarakat seringkali diajak, dipersuasi, atau diperintahkan untuk ikut serta dalam proyek pemberdayaan, namun keberlanjutannya tidak terjaga.

Organisasi di luar pemerintah berusaha mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat melalui penguatan kelembagaan, pendidikan politik, dan advokasi. Meskipun upaya ini mampu mengatasi ketergantungan dalam beberapa kasus, kemajuannya seringkali lambat. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan di Kabupaten Bantul, program tersebut telah memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pengawasan dalam implementasinya perlu agar tidak terjadi penyelewengan dan bantuan dapat tepat sasaran serta tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

KESIMPULAN

Meskipun Kabupaten Bantul memiliki sumber daya dan potensi yang melimpah, namun masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul masih memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di wilayah tersebut. Namun, terdapat tren positif dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Pemerintah Kabupaten Bantul merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017. Kebijakan ini menjadi dasar bagi berbagai program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul berfokus pada pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan taraf hidup masyarakat miskin. Upaya pemberdayaan tersebut meliputi peningkatan kemampuan dan pendapatan, penurunan beban pengeluaran, dan pengelolaan sistem informasi. Efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul diukur berdasarkan cakupan program yang menjangkau kelompok sasaran, ketepatan sasaran dan akuntabilitas program, kemudahan akses informasi dan layanan, serta kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, saran untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul adalah:

1. Memperkuat koordinasi antar OPD, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.
2. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas program untuk memastikan ketepatan sasaran dan mencegah penyelewengan.
3. Mempermudah akses informasi dan layanan bagi masyarakat miskin.
4. Melakukan evaluasi program secara berkala dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan.
6. Memperkuat sistem informasi dan pengelolaan data untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dapat menjadi lebih efektif dan mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

REFERENSI

- Fahreza, Arifin, J., & Suryani, L. (2019). Effectiveness of Prosperous Rice Program (Rastra) in Binangon Village , Muara Komam District Paser Regency. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrsi Bisnis*, 2(2), 566–584.
- Fidarina, F. R., & Megawati Suci Si.M., D. (2022). Implementasi Kebijakan Pusat Inkubasi Bisnis. *Implementasi Kebijakan Pusat Inkubasi*, 10(4), 1283–1292.
- Poister, T. H. (2003). *Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations*. Jossey-Bass.
- Rindiani, R., & Hartatik, S. (2020). Pola Konsumsi Pangan dan Asupan Makanan Penduduk Miskin di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 20(1), 13–18. <https://doi.org/10.25047/jii.v20i1.1937>
- Umar, D. A., Mukramin, U., Arifin, J., Aziz, F., Sultan Alauddin No, J., Sari, G., Rappocini, K., Makassar, K., & Selatan Korespondensi penulis, S. (2023). Kemiskinan Masyarakat Urban Makassar. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(3), 12–25. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.339>
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Wisnutama, A., Pramono, J., & Haryanto, A. T. (2023). Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022. *Ji@P*, 12(2). <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.9002>